

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 196 /PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN  
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif

Fungsi : Pendidikan dan Pelatihan  
Kode : DL

Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	DLO	Pendidikan				
1.1.	DL00	Beasiswa				
1.1.1.	DL000	Perencanaan Kebutuhan dan Program Beasiswa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1.1.2.	DL001	Seleksi dan Penempatan Program Beasiswa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1.1.3.	DL002	Pemantauan Karyasiswa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Fungsi : Pendidikan dan Pelatihan  
Kode : DL

Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.2.	DL01	Pendidikan di Luar Kedinasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Sumber Daya Manusia dan Bagian Sumber Daya Manusia seluruh Eselon I
1.3.	DL02	Akreditasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1.4.	DL03	Konsultasi dan Asistensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah Eselon I
1.5.	DL04	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah Eselon I
2.	DL1	Pelatihan				
2.1.	DL10	Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2.2.	DL11	Kurikulum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Fungsi : Pendidikan dan Pelatihan  
Kode : DL

Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.3.	DL12	Tenaga Pengajar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2.4.	DL13	Pelaksanaan pelatihan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2.5.	DL14	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2.6.	DL15	Penerbitan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Sumber Daya Manusia dan Bagian Sumber Daya Manusia seluruh Eselon I
3.	DL2	Sertifikasi Kompetensi				
3.1.	DL20	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi				
3.1.1.	DL200	Pelaksanaan Ujian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Fungsi : Pendidikan dan Pelatihan  
Kode : DL

Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.1.2.	DL201	Pengumuman Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi	Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
3.2.	DL21	Penerbitan Sertifikat Profesi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Pengolah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Fungsi : Hukum  
Kode : HK

Fungsi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	HK0	Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit Kerja yang menangani fungsi hukum
2.	HK1	Penyusunan Produk Hukum	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Hukum
3.	HK2	Produk Hukum				
3.1.	HK20	Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Hukum
3.2.	HK21	Produk Hukum yang Bersifat Penetapan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Hukum
4.	HK3	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Hukum

Fungsi : Hukum  
Kode : HK

Fungsi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.	HK4	Kerja Sama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Hukum
6.	HK5	Penanganan Perkara, Telaahan Kasus Hukum Dan Pendampingan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Advokasi
7.	HK6	Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Hukum/Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Fungsi : Humas dan Protokol  
Kode : HM

Fungsi humas dan protokol adalah penyiapan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	HM0	Humas				
1.1.	HM00	Hubungan Antar Lembaga	Terbatas	Eselon IV	Dapat merugikan Kementerian Keuangan, stakeholder, dan hubungan baik antara Kementerian Keuangan dan stakeholder	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
1.2.	HM01	Hubungan Dengan Media	Terbatas	Eselon IV	Dapat merugikan Kementerian Keuangan, stakeholder, dan hubungan baik antara Kementerian Keuangan dan stakeholder	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
1.3.	HM02	<i>Monitoring</i> dan Analisis Berita	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
1.4.	HM03	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Karena sudah dipublikasikan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
1.4.1.	HM030	Publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Karena sudah dipublikasikan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga

Fungsi : Humas dan Protokol  
Kode : HM

Fungsi humas dan protokol adalah penyiapan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.5.	HM04	Pidato	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
1.6.	HM05	<i>Hearing</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
2.	HM1	Protokol				
2.1.	HM10	Upacara	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
2.2.	HM11	Dokumentasi dan Peliputan	Terbatas	Eselon IV	Terdapat kegiatan pendokumentasian kegiatan yang sifatnya tertutup untuk umum serta bahan dan materi yang digunakan untuk penyusunan berita yang tidak boleh dipublikasikan secara umum jika belum diolah	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga



Fungsi : Humas dan Protokol  
Kode : HM

Fungsi humas dan protokol adalah penyiapan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.	HM2	Pengaduan Masyarakat/ <i>Help Desk/Call Center</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
4.	HM3	Layanan Informasi Publik				
4.1.	HM30	Permohonan Informasi Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
4.2.	HM31	Daftar Informasi Publik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
4.3.	HM32	Keberatan Layanan Informasi Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
4.4.	HM33	Sengketa Informasi Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga

Fungsi : Humas dan Protokol  
Kode : HM

Fungsi humas dan protokol adalah penyiapan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.5.	HM34	Uji Konsekuensi dan Pembahasan Informasi Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga
4.6.	HM35	Laporan layanan Publik	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit Pengolah yang menangani Hubungan Antar Lembaga

Fungsi : Kearsipan  
Kode : KA

Fungsi kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	KA0	Pengendalian dan Pengurusan Naskah Dinas	Terbatas	Eselon V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Tata Usaha Kementerian dan Sekretariat Direktorat/ Badan Eselon I/ Non Eselon
2.	KA1	Penggandaan dan Peminjaman Arsip	Biasa/ Terbuka	Eselon V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Tata Usaha Kementerian dan Sekretariat Direktorat/ Badan Eselon I
3.	KA2	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip				
3.1.	KA20	Pengelolaan Arsip Aktif	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/ Badan
3.2.	KA21	Pengelolaan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/ Badan
3.3.	KA22	Pengelolaan Arsip Vital	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga dan Bagian/Subbagian Umum

Fungsi : Kearsipan  
Kode : KA

Fungsi kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.4.	KA23	Pengelolaan Arsip Terjaga	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
3.5.	KA24	Perawatan Arsip	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
3.6.	KA25	Alih Media Arsip	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
4.	KA3	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
5.	KA4	Penyusutan Arsip				
5.1.	KA40	Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan

Fungsi : Kearsipan  
Kode : KA

Fungsi kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.2.	KA41	Pemusnahan Arsip	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
5.3.	KA42	Penyerahan Arsip Statis	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
6.	KA5	<i>Database</i> Kearsipan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
7.	KA6	Apresiasi dan Lomba Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
8.	KA7	Akreditasi Kearsipan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan
9.	KA8	Pengawasan Kearsipan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/Badan

Fungsi : Kearsipan  
Kode : KA

Fungsi kearsipan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
10.	KA9	Sertifikasi Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian TU Kementerian dan Sekretariat Direktorat/Inspektorat/ Badan

Fungsi : Kepegawaian  
Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	KP0	Pengadaan Pegawai				
1.1.	KP00	Formasi SDM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
1.1.1.	KP001	Pegawai Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
1.1.2.	KP002	Survei Perencanaan SDM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM
1.2.	KP01	Rekrutmen SDM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM
1.3.	KP02	Masa Probasi (Percobaan, dan Orientasi) Calon Pegawai	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM

Fungsi : Kepegawaian  
Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.4.	KP03	Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM
2.	KP1	Pengelolaan Kompetensi dan Kinerja				
2.1.	KP10	Pengembangan Kompetensi				
2.1.1.	KP100	Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
2.1.2.	KP101	<i>Assessment Center (AC)</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
2.1.3.	KP102	<i>Profiling Pegawai</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
2.1.4.	KP103	Pendidikan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian



Fungsi : Kepegawaian  
 Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.1.5.	KP104	Pembelajaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
2.2.	KP11	Manajemen Kinerja Pegawai				
2.2.1.	KP110	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
2.2.2.	KP111	Penilaian Kinerja Jabatan Pelaksana	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Biro Organta/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
2.2.3.	KP112	Hasil Pemetaan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
3.	KP2	Manajemen Karir				
3.1.	KP20	Pengembangan Karir				
3.1.1.	KP200	Manajemen Talenta	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian

Fungsi : Kepegawaian  
Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.1.2.	KP201	Mutasi dan Promosi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
3.1.3.	KP202	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
3.1.4.	KP203	Kenaikan Pangkat	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
3.1.5.	KP204	Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
4.	KP3	Kode Etik dan Disiplin Pegawai				
4.1.	KP30	Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian

Fungsi : Kepegawaian  
Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.2.	KP31	Sanksi/Hukuman	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
5.	KP4	Kesejahteraan Pegawai				
5.1.	KP40	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
5.2.	KP41	Cuti dan Izin Bepergian ke Luar Negeri di luar Kedinasan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
5.3.	KP42	Layanan Kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
5.4.	KP43	Penghargaan atau Tanda Jasa	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian

Fungsi : Kepegawaian  
Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.	KP5	Administrasi SDM				
6.1.	KP50	Perjalanan Dinas Dalam Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
6.2.	KP51	Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
6.3.	KP52	Surat Pernyataan dan Surat Kuasa LHK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Kepatuhan dan verifikasi kekayaan pegawai, Inspektorat Jenderal
7.	KP6	Pemberhentian Pegawai				
7.1.	KP60	Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
7.2.	KP61	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian

Fungsi : Kepegawaian  
Kode : KP

Fungsi kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan kepegawaian dari pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.3.	KP62	Pemberhentian Pegawai akibat Tewas/ Hilang/ meninggal dalam tugas	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
8.	KP7	Personal File Pegawai				
8.1.	KP70	Pengelolaan Berkas Perseorangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian
9.	KP8	Penyajian Informasi SDM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro SDM/Bagian SDM/Unit Pengolah yang menangani kepegawaian

Fungsi : Keuangan  
Kode : KU

Fungsi keuangan adalah melakukan pelaksanaan urusan persuratan, serta melakukan pengelolaan, pemeliharaan pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	KU0	Penganggaran Kementerian Keuangan				
1.1.	KU00	Penganggaran Pada Kementairan Keuangan				
1.1.1.	KU000	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.1.2.	KU001	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.2.	KU01	Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Penganggaran/ Unit Kerja yang Menagani Penganggaran
2.	KU1	Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan				
2.1.	KU10	Asistensi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan

Fungsi : Keuangan  
Kode : KU

Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	KU0	Penganggaran Kementerian Keuangan				
1.1.	KU00	Penganggaran Pada Kementearian Keuangan				
1.1.1.	KU000	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.1.2.	KU001	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.2.	KU01	Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Penganggaran/ Unit Kerja yang Menangani Penganggaran
2.	KU1	Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan				
2.1.	KU10	Asistensi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan

A

Fungsi : Keuangan  
Kode : KU

Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.2.	KU11	Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.3.	KU12	Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.4.	KU13	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan
2.5.	KU14	Belanja/ Pengeluaran Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Keuangan
3.	KU2	Pelaksanaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan				
3.1.	KU20	Laporan Keuangan Kementerian Keuangan				
3.1.1.	KU200	Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ( <i>Audited</i> )	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat Eselon I/Badan/Lembaga di



Fungsi : Keuangan  
Kode : KU

Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						lingkungan Kementerian Keuangan
3.1.2.	KU201	Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ( <i>Unaudited</i> )	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan/Sekretariat Eselon I/Badan/Lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan
3.1.3.	KU202	Laporan Keuangan Satuan Kerja/UAKEPAW di lingkungan Kementerian Keuangan ( <i>Audited</i> )	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh unit pengolah yang menangani Pelaksanaan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan setingkat Eselon II dan/atau dibawahnya
3.1.4.	KU203	Laporan Keuangan Satuan Kerja/UAKEPAW di lingkungan Kementerian Keuangan ( <i>Unaudited</i> )	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh unit pengolah yang menangani Pelaksanaan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan setingkat Eselon II dan/atau dibawahnya
3.2.	KU21	Laporan Perkembangan Keadaan Kas	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit yang menangani Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan

Fungsi : Keuangan  
Kode : KU

Fungsi keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran urusan keuangan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.3.	KU22	Rekonsiliasi Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit yang menangani Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan
3.4.	KU23	Data rekening BUN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit yang menangani Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan
3.5.	KU24	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit yang menangani Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan

Fungsi : Organisasi dan Tatalaksana  
 Kode : OT

Fungsi organisasi dan tatalaksana mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	OT0	Pembentukan/Perubahan /Penghapusan Organisasi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Bagian Organisasi dan Tatalaksana
2.	OT1	Tatalaksana/Mekanisme Kerja				
2.1.	OT10	Standardisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i> /Proses Bisnis/ <i>Enterprise</i> Arsitektur	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Unit Kerja yang menangani Ketatalaksanaan
2.2.	OT11	Rapat	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Unit Kerja yang menangani Ketatalaksanaan
3.	OT2	Analisan dan Evaluasi Jabatan				
3.1.	OT20	Uraian Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Unit Kerja yang menangani Ketatalaksanaan
3.2.	OT21	Peringkat Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Biro SDM/Unit Kerja yang menangani Ketatalaksanaan/ Kepegawaian

Fungsi : Organisasi dan Tatalaksana  
Kode : OT

Fungsi organisasi dan tatalaksana mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.3.	OT22	Kamus Kompetensi Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Biro SDM
3.4.	OT23	Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana
3.5.	OT24	Analisis Beban Kerja	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/ Unit Kerja yang menangani Ketatalaksanaan
4.	OT3	Layanan Mutu/ <i>Service Quality</i>				
4.1.	OT30	Proses Layanan Mutu/ <i>Service Quality</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana/Unit Kerja yang menangani Ketatalaksanaan
4.2.	OT31	Penetapan Layanan Mutu/ <i>Service Quality</i>	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Tatalaksana

Fungsi : Organisasi dan Tatalaksana  
Kode : OT

Fungsi organisasi dan tatalaksana mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.	OT4	Manajemen Risiko	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kinerja Kementerian Keuangan	Inspektorat/ Unit yang menangani kepatuhan internal/ manajemen risiko
6.	OT5	Manajemen Kinerja				
6.1.	OT50	Manajemen Kinerja Organisasi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan/Unit Kerja yang menangani pengelolaan kinerja organisasi

Fungsi : Perlengkapan  
Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PLO	Perencanaan Barang Milik Negara dan Pengadaan				
1.1.	PL00	Perencanaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
1.2.	PL01	Perencanaan Pengadaan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
2.	PL1	Pengadaan				
2.1.	PL10	Pengadaan Barang Non Konstruksi				
2.1.1.	PL100	Pengadaan Barang Persediaan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
2.1.2.	PL101	Pengadaan Barang Inventaris	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum

Fungsi : Perlengkapan  
 Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.2.	PL11	Pengadaan Jasa Non Konstruksi				
2.2.1.	PL110	Pengadaan Jasa Konsultasi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
2.2.2.	PL111	Pengadaan Jasa Lainnya	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
2.3.	PL12	Pengadaan Konstruksi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
2.4.	PL13	Penawaran/Prakualifikasi yang Tidak Jadi Pemenang	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
3.	PL2	Penyimpanan Barang	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum

Fungsi : Perlengkapan  
Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.	PL3	Distribusi Barang				
4.1.	PL30	Distribusi Barang Persediaan	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
4.2.	PL31	Distribusi Barang Inventaris	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
5.	PL4	Penatausahaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen Asset dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.	PL5	Penggunaan Barang Milik Negara				
6.1.	PL50	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara				
6.1.1.	PL500	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum



Fungsi : Perlengkapan  
Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.1.2.	PL501	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.1.3.	PL502	Penggunaan Sementara Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.1.4.	PL503	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.1.5.	PL504	Alih Penggunaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.2.	PL51	Pemanfaatan Barang Milik Negara				
6.2.1.	PL510	Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum

Fungsi : Perlengkapan  
Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.2.1.	PL511	Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Pinjam Pakai	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.2.3.	PL512	Pemanfaatan Barang Milik Negara Selain Berupa Sewa dan Pinjam Pakai	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.3.	PL52	Pemindahtanganan Barang Milik Negara				
6.3.1.	PL520	Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Hibah	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.3.2.	PL521	Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Tukar Menukar	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.3.3.	PL522	Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Cara Penjualan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum

Fungsi : Perlengkapan  
Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.3.4.	PL523	Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Cara Penjualan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.3.5.	PL524	Persetujuan Pemindahtanganan Bongkaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.4.	PL53	Penghapusan Barang Milik Negara				
6.4.1.	PL530	Penghapusan Barang Milik Negara karena Sebab-sebab Lain	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum
6.4.2.	PL531	Usulan Penghapusan Barang Milik Negara karena Sebab-sebab Lain	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/Subbagian Umum

Fungsi : Perlengkapan  
Kode : PL

Fungsi perlengkapan adalah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan barang/jasa serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.4.3.	PL532	Penghapusan Barang Milik Negara karena Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Tidak Ada Upaya Hukum lainnya	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/ Subbagian Umum
6.4.4.	PL533	Penghapusan Barang Milik Negara karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/ Subbagian Umum
6.4.5.	PL534	Penghapusan Barang Milik Negara karena Pemusnahan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/ Subbagian Umum
7.	PL6	Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen Asset dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/ Subbagian Umum
8.	PL7	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	Terbuka	Eselon IV	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Manajemen BMN dan Pengadaan/Bagian Perlengkapan/Bagian/ Subbagian Umum

Fungsi : Perencanaan  
Kode : PR

Fungsi perencanaan mempunyai tugas penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan rencana strategis Kementerian Keuangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PR0	Perencanaan				
1.1.	PR00	Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.2.	PR01	Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.3.	PR02	Rencana Kerja Strategis Lima Tahunan (RENSTRA)	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.3.1.	PR020	Rencana Strategis Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/Publik	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.3.2.	PR021	Rencana Strategis Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perencanaan/Unit Kerja yang menangani penyusunan Renstra

Fungsi : Perencanaan  
Kode : PR

Fungsi perencanaan mempunyai tugas penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan rencana strategis Kementerian Keuangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.4.	PR03	Rencana Lintas Kementerian	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.5.	PR04	Rencana Kerja (RENJA)				
1.5.1.	PR040	Rencana Kerja Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
1.5.2.	PR041	Rencana Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perencanaan/Unit Kerja yang menangani penyusunan Renja
1.6.	PR05	Rencana Kegiatan Kementerian Keuangan yang Dibiayai Pinjaman dan Hibah	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	PR1	Laporan kinerja Kementerian Keuangan				
2.1.	PR10	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan

Fungsi : Perencanaan  
Kode : PR

Fungsi perencanaan mempunyai tugas penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan rencana strategis Kementerian Keuangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.2.	PR11	Laporan Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan	Terbuka	Umum/Publik	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Bagian Perencanaan/Unit Kerja yang menangani penyusunan laporan akuntabilitas
2.3.	PR12	Laporan <i>Insidental</i> Instansi				
2.3.1.	PR120	Laporan <i>Insidental</i> Menteri kepada Presiden/DPR	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Kerja yang menangani penyusunan laporan insidental
2.3.2.	PR121	Laporan <i>Insidental</i> Eselon kepada Menteri	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Kerja yang menangani penyusunan laporan insidental
2.3.3.	PR122	<i>Daily Activity Monitoring System (DAMS)</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit Kerja yang menangani pengelolaan DAMS

Fungsi : Perpustakaan  
 Kode : PS

Fungsi perpustakaan adalah melaksanakan kegiatan perpustakaan dan pengadaan bahan pustaka sampai dengan layanan perpustakaan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PS0	Pengembangan Koleksi/Bahan Pustaka				
1.1.	PS00	Akuisisi				
1.1.1.	PS001	Hibah	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
1.1.2.	PS002	Implementasi Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
1.2.	PS01	Pengolahan Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
1.3.	PS02	Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
2.	PS1	Jasa Perpustakaan dan Informasi				
2.1.	PS10	Keanggotaan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan



Fungsi : Perpustakaan  
Kode : PS

Fungsi perpustakaan adalah melaksanakan kegiatan perpustakaan dan pengadaan bahan pustaka sampai dengan layanan perpustakaan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.2.	PS11	Sirkulasi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
2.3.	PS2	Preservasi Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
2.4.	PS3	Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan
2.5.	PS4	Penyiangan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi perpustakaan

Fungsi : Pengawasan  
Kode : PW

Fungsi pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PW0	Pengawasan Internal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kinerja Kementerian Keuangan	Inspektorat/Unit yang menangani kepatuhan internal
2.	PW1	Pengawasan Eksternal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kinerja Kementerian Keuangan	Inspektorat/Unit yang menangani kepatuhan internal
3.	PW2	Pengawasan Instansi Perpajakan				
3.1.	PW20	Pengawasan Pajak	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak terhadap ketahanan ekonomi nasional karena memuat rencana awal perubahan perpajakan	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
3.2.	PW21	Pengawasan Bea dan Cukai	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak terhadap ketahanan ekonomi nasional karena memuat rencana awal perubahan perpajakan	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
3.3.	PW22	Pengaduan dan Mediasi	Rahasia	Eselon IV	Memuat Data Wajib Pajak yang dikecualikan berdasarkan Pasal 34 UU KUP	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Fungsi : Pengawasan  
Kode : PW

Fungsi pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.4.	PW23	Saran dan Rekomendasi Komite Pengawasan Perpajakan	Rahasia	Ketua Komite Pengawas Perpajakan	Memiliki dampak terhadap ketahanan ekonomi nasional karena memuat rencana awal perubahan perpajakan	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Fungsi : Rumah Tangga  
Kode : RT

Fungsi rumah tangga adalah pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, peralatan operasional, mekanikal elektrikal, ketertiban dan keamanan, serta kegiatan operasional lainnya terkait kerumahtanggaan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	RT0	Penggunaan Gedung dan Fasilitas Kantor	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi kerumahtanggaan
2.	RT1	Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor				
2.1.	RT10	Bangunan Gedung dan Lingkungan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi kerumahtanggaan
2.2.	RT11	Peralatan Operasional	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi kerumahtanggaan
2.3.	RT12	Mekanikal Elektrikal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi kerumahtanggaan
3.	RT2	Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi kerumahtanggaan

Fungsi : Rumah Tangga  
Kode : RT

Fungsi rumah tangga adalah pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, peralatan operasional, mekanikal elektrikal, ketertiban dan keamanan, serta kegiatan operasional lainnya terkait kerumahtanggaan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.	RT3	Pengelolaan Parkir	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi kerumahtanggaan

Fungsi : Teknologi Informasi  
Kode : TI

Fungsi teknologi informasi adalah penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	TIO	Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait teknologi Informasi
2.	TI1	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait teknologi Informasi
3.	TI2	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi bidang teknologi Informasi
4.	TI3	<i>Hosting</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi bidang teknologi Informasi
5.	TI4	Layanan <i>Back Up</i> Data Digital	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait teknologi Informasi

Fungsi : Teknologi Informasi  
Kode : TI

Fungsi teknologi informasi adalah penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.	TI5	Akses Sistem	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait teknologi Informasi

B. Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Substantif

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	AG0	Penyusunan APBN/P				
1.1.	AG00	Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN/P	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1.2.	AG01	Penyusunan Draf RUU APBN dan Draf RUU APBN/P	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1.3.	AG02	Penyusunan dan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama				
1.3.1.	AG020	Penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1.3.2.	AG021	Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1.4.	AG03	Pembahasan Antara Pemerintah dan DPR terkait Penyusunan APBN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.	AG1	Perencanaan Anggaran				
2.1.	AG10	Penyusunan Pagu Indikatif	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
2.2.	AG11	Penyusunan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
2.3.	AG12	Penyusunan Alokasi Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
2.4.	AG13	Penyusunan Keputusan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
2.5.	AG14	DIPA Awal Tahun Anggaran				
2.5.1.	AG140	Penyusunan DIPA Awal Tahun Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.5.2.	AG141	Penyampaian DIPA Awal Tahun Anggaran	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
2.6.	AG15	Penyusunan <i>Multiyears Contract</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						Anggaran Bendahara Umum Negara
3.	AG2	Perubahan Anggaran				
3.1.	AG20	Penyusunan Pagu APBN/P	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
3.2.	AG21	Revisi Anggaran Non APBN/P	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.3.	AG22	Revisi Anggaran APBN/P	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
3.4.	AG23	Penyusunan Rekomendasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi ( <i>Reward and Punishment</i> )	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
4.	AG3	Penyusunan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara				

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.1.	AG30	Proses Penetapan BA BUN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
4.2.	AG31	Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran BA BUN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
4.3.	AG32	Usulan Anggaran BA BUN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
4.5.	AG33	Permintaan Dana Beban BA BUN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Fungsi : Anggaran  
Kode : AG

Fungsi anggaran adalah melaksanakan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.	AG4	Penyusunan Standar Biaya	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Sistem Penganggaran



Fungsi : Pembiayaan dan Risiko

Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	BR0	Pinjaman dan Hibah				
1.1.	BR00	Pinjaman Multilateral				
1.1.1.	BR000	Persiapan Negosiasi Pinjaman Multilateral	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.1.2.	BR001	Negosiasi Pinjaman Multilateral	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.1.3.	BR002	Pelaksanaan Pinjaman Multilateral	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.2.	BR01	Pinjaman Bilateral				
1.2.1.	BR010	Persiapan Negosiasi Pinjaman Bilateral	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.2.2.	BR011	Negosiasi Pinjaman Bilateral	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.2.3.	BR012	Pelaksanaan Pinjaman Bilateral	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah

A

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.3.	BR02	Hibah	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.4.	BR03	Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)				
1.4.1.	BR030	Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.4.2.	BR031	Persiapan Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
1.4.3.	BR032	Negosiasi Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.4.4.	BR033	Pelaksanaan Perjanjian Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pinjaman dan Hibah
2.	BR1	Surat Utang Negara				
2.1.	BR10	Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik				
2.1.1.	BR100	Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.1.2.	BR101	Dokumen Pelaksanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.2.	BR11	Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara				

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.2.1.	BR110	Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.2.2.	BR111	Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.3.	BR12	Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik				
2.3.1.	BR120	Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.3.2.	BR121	Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.4.	BR13	Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing				
2.4.1.	BR130	Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.4.2.	BR131	Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.5.	BR14	Penjualan Surat Utang Negara dalam Denominasi Yen				
2.5.1.	BR140	Dokumen Perencanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.5.2.	BR141	Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.6.	BR15	Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement				
2.6.1.	BR150	Dokumen Perencanaan Penjualan SUN dengan cara <i>Private Placement</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.6.2.	BR151	Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dengan cara <i>Private Placement</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.7.	BR16	Transaksi Penjualan/Pembelian Surat Utang Negara Secara Langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.8.	BR17	Transaksi Peminjaman Surat Utang Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.9.	BR18	Pelaksanaan Penunjukkan Dealer Utama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
2.10.	BR19	Pengembangan Pasar Surat Utang Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara
3.	BR2	Pembiayaan Syariah				

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.1.	BR20	Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah
3.2.	BR21	Aset Surat Berharga Syariah Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah
3.3.	BR22	Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah
3.4.	BR23	Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ( <i>Special Purpose Vehicle</i> )	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah
3.5.	BR24	Pengelolaan Transaksi SBSN	Terbuka	Umum/ Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah
3.6.	BR25	Analisis Keuangan dan Pengembangan Pasar SBSN				
3.6.1.	BR250	Analisis Keuangan dan Pasar SBSN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.6.2.	BR251	Pengembangan Pasar SBSN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan Syariah
4.	BR3	Strategi dan Portofolio Pembiayaan				
4.1.	BR30	Perencanaan dan Strategi Pembiayaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.2.	BR31	Analisis Dan Risiko Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.3.	BR32	Kewajiban Kontijensi				
4.3.1.	BR320	Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.3.2.	BR321	Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.3.3.	BR322	Penjaminan Monitoring Penjaminan Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan



Fungsi : Pembiayaan dan Risiko

Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.3.4.	BR323	<i>Internal Credit Rating (ICR)</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.3.5.	BR324	Imbal Jasa Penjaminan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.3.6.	BR325	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
4.4.	BR33	Analisis Pengelolaan Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
5.	BR4	Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen				
5.1.	BR40	Transaksi Pinjaman	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.2.	BR41	Transaksi Penarikan Dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri/Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.3.	BR42	Pengesahan Transaksi Hibah Langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.4.	BR43	Pengesahan Transaksi Hibah Terencana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.5.	BR44	Transaksi Surat Utang Negara/Surat Berharga Syariah Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.6.	BR45	Kewajiban Penjaminan Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.7.	BR46	Rekonsiliasi Pinjaman	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.8.	BR47	Akuntansi Dan Pelaporan keuangan pinjaman dan Hibah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
5.9.	BR48	Pelaksanaan Belanja Hibah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
6.	BR5	Pengelolaan Resiko Keuangan Negara				

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko

Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.1.	BR50	Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
6.2.	BR51	Surat Jaminan Pemerintah	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
6.3.	BR52	Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
6.4.	BR53	Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara				
6.4.1.	BR530	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berbasis <i>Asset Liability Management (ALM)</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
6.4.2.	BR531	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Panas Bumi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
6.5.	BR54	Kerjasama Kelembagaan di bidang Pengelolaan Risiko	Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.	BR6	Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur				
7.1.	BR60	Fasilitas Penyiapan Proyek / Project Development Facility (PDF)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
7.2.	BR61	Dana Dukungan Kelayakan / Viability Gap Fund (VGF)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
7.3.	BR62	Skema Ketersediaan Layanan / Availability Payment (AP)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
7.4.	BR63	Perjanjian Penjaminan Bersama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Fungsi : Pembiayaan dan Risiko  
Kode : BR

Fungsi pembiayaan dan risiko adalah merumuskan serta melaksanakan tugas bidang pembiayaan, utang, hibah dan risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.5.	BR64	Kerja sama kelembagaan dalam rangka pembiayaan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
7.6.	BR65	Asistensi dan peningkatan kapasitas stakeholders proyek KPBU	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Fungsi : Perimbangan Keuangan  
 Kode : IK

Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	IK0	Dana Perimbangan				
1.1.	IK00	Dana Transfer Umum				
1.1.1.	IK000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
1.1.2.	IK001	Dana Alokasi Umum (DAU)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
1.2.	IK01	Dana Transfer Khusus				
1.2.1.	IK010	Dana Alokasi Khusus Fisik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
1.2.2.	IK011	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2.	IK1	Dana Insentif Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
3.	IK2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan				
3.1.	IK20	Dana Otonomi Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Fungsi : Perimbangan Keuangan  
Kode : IK

Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.2.	IK21	Dana Keistimewaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
4.	IK3	Dana Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
5.	IK4	Pembiayaan Daerah				
5.1.	IK40	Pinjaman Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
5.2.	IK41	Hibah Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
5.3.	IK42	Obligasi Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
5.4.	IK43	Persetujuan/Penolakan Atas Pelampauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
6.	IK5	Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah				

Fungsi : Perimbangan Keuangan  
Kode : IK

Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.1.	IK50	Data Keuangan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
6.2.	IK51	Data Keuangan Non Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
7.	IK6	Penataan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
8.	IK7	Kapasitas Keuangan Daerah/Pendapatan Asli Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
9.	IK8	Pelaksanaan Transfer				
9.1.	IK80	Rencana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN)				
9.1.1.	IK800	Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Fungsi : Perimbangan Keuangan  
Kode : IK

Fungsi perimbangan keuangan adalah penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
9.1.2.	IK801	Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Hibah ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
9.2.	IK81	Penyaluran Transfer ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	KNO	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Eselon IV	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam pengelolaan BMN	Direktorat BMN
2.	KN1	Penatausahaan BMN				
2.1.	KN10	Rekonsiliasi BMN	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat BMN/Kanwil KN /KPKNL
2.2.	KN11	Pelaporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna				
2.2.1.	KN110	Laporan Semesteran/Tahunan dari Kementerian / Lembaga ( <i>Unaudited</i> )	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat BMN/Kanwil KN/KPKNL
2.2.2.	KN111	Laporan BMN Tahunan dari Kementerian / Lembaga ( <i>Audited</i> )	Terbuka	Publik/Umum	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat BMN

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.3.	KN12	Pelaporan Barang Pengelola	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat BMN/Kanwil KN/KPKNL
2.4.	KN13	Pelaporan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat BMN/Kanwil KN/KPKNL
2.4.1.	KN130	Laporan BMN Unaudited (Semesteran/Tahunan)	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat BMN
2.4.2.	KN131	Laporan BMN Audited	Terbuka	Publik/Umum	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat BMN

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.4.3.	KN132	Laporan Inventarisasi BMN Kementerian/Lembaga	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat BMN/Kanwil KN/KPKNL
2.5.	KN14	Sertifikasi BMN	Rahasia	Eselon III	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat BMN/Kanwil KN/KPKNL
2.6.	KN15	Likuidasi Satuan Kerja	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
3.	KN2	Pengelolaan BMN				
3.1.	KN20	Penggunaan BMN				
3.1.1.	KN200	Penetapan Status Penggunaan BMN	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi /Kanwil KN/KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.1.2.	KN201	Pengalihan Status BMN	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi /Kanwil KN/KPKNL
3.1.3.	KN202	BMN yang Dioperasikan Pihak Lain	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi /Kanwil KN/KPKNL
3.1.4.	KN203	BMN yang Digunakan Sementara	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi /Kanwil KN/KPKNL
3.1.5.	KN204	Persetujuan Penggunaan BMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi/Kanwil KN/KPKNL
3.2.	KN21	Pemanfaatan Barang Milik Negara				

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.2.1.	KN210	Sewa BMN	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.2.2.	KN211	Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.2.3.	KN212	Kerja Sama Pemanfaatan BMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
3.2.4.	KN213	Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.2.5.	KN214	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
3.2.6.	KN215	Persetujuan Pemanfaatan BMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.3.	KN22	Pengelolaan <i>Unutilized Asset</i>				
3.3.1.	KN220	Pengusulan BMN Idle	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Kanwil KN/KPKNL
3.3.2.	KN221	Penetapan BMN Idle	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Kanwil KN/KPKNL
3.4.	KN23	Penghapusan BMN				

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.4.1.	KN230	Penghapusan BMN karena Beralihnya Kepemilikan	Terbatas	Eselon III	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.4.2.	KN231	Penghapusan BMN Pemusnahan	Terbatas	Eselon III	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.4.3.	KN232	Penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.4.4.	KN233	Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
3.4.5.	KN234	Penghapusan BMN karena alih status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL



Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.4.6.	KN235	Penetapan Penghapusan BMN	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi /Kanwil KN/KPKNL
3.5.	KN24	Pemindahtanganan BMN	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi /Kanwil KN/KPKNL
3.5.1.	KN240	Penjualan BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Kanwil KN / KPKNL
3.5.2.	KN241	Penjualan BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital Negara	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi



Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.5.3.	KN242	Tukar Menukar BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Kanwil KN / KPKNL
3.5.4.	KN243	Tukar Menukar BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
3.5.5.	KN244	Hibah BMN tanpa Persetujuan DPR/Presiden	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Kanwil KN / KPKNL
3.5.6.	KN245	Hibah BMN dengan Persetujuan DPR/Presiden	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
3.5.7.	KN246	Penyertaan Modal Pemerintah berupa BMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.5.8.	KN247	Penyetaraan Modal Pemerintah berupa BMN yang dari Awal Pengadaannya telah direncanakan menjadi PMP	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
3.5.9.	KN248	Penetapan Pemindahtanganan BMN	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi / Kanwil KN/KPKNL
4.	KN3	Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL)				
4.1.	KN30	Penetapan Status Penggunaan KNL	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain/ Kanwil KN/KPKNL
4.2.	KN31	Pengalihan Status Penggunaan KNL	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain/ Kanwil KN/KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.3.	KN32	Pemanfaatan KNL				
4.3.1.	KN320	Pemanfaatan Sewa KNL	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain/Kanwil KN/KPKNL
4.3.2.	KN321	Pemanfaatan Pinjam Pakai KNL	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain/Kanwil KN/KPKNL
4.3.3.	KN322	Kerja Sama Pemanfaatan KNL	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain/Kanwil KN/KPKNL
4.3.4.	KN323	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur KNL	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.3.5.	KN324	Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna KNL	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.3.6.	KN325	Persetujuan Pemanfaatan KNL	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain/Kanwil KN/KPKNL
4.4.	KN33	Pemindahtanganan KNL				
4.4.1.	KN330	Penjualan KNL dengan persetujuan Presiden	Rahasia	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.2.	KN331	Penjualan KNL dengan persetujuan DPR	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.4.3.	KN332	Penjualan KNL dengan persetujuan Menteri	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.4.	KN333	Tukar Menukar KNL dengan Persetujuan Presiden	Rahasia	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.5.	KN334	Tukar Menukar KNL dengan Persetujuan DPR	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.6.	KN335	Tukar Menukar KNL dengan Persetujuan Menteri Keuangan	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.7.	KN336	Hibah KNL dengan Persetujuan Presiden	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.4.8.	KN337	Hibah KNL dengan Persetujuan DPR	Terbatas	Eselon II	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital negara	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.9.	KN338	Hibah KNL dengan Persetujuan Menteri Keuangan	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.10.	KN339	Penyertaan Modal Pemerintah KNL	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.4.11.	KN3310	Penyertaan Modal Pemerintah KNL yang dari Awal Pengadaan sudah direncanakan untuk dijadikan PMP	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

A

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.4.12.	KN3311	Persetujuan Pemindahtanganan KNL	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.5.	KN34	Penjualan KNL berupa inventaris	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.6.	KN35	Pengelolaan Aset Eks PT. Perusahaan Pengelolaan Asset (PT.PPA)				
4.6.1.	KN350	Berita Acara Serah terima KNL	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain



Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.6.2.	KN351	Kebijakan Terkait Eks PT PPA	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.7.	KN36	Pengelolaan Aset Bank Dalam Likudasi (BDL)				
4.7.1.	KN360	Penyerahan KNL Bank Dalam Likudasi (BDL)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.7.2.	KN361	Kebijakan Terkait Eks BDL Umum	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.7.3.	KN362	Kebijakan Terkait Eks Program Penjaminan Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.8.	KN37	Sisa Aset Yang Timbul Akibat Krisis	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
4.9.	KN38	Pengelolaan Aset Eks BPPN				
4.9.1.	KN380	Kebijakan Terkait Eks BPPN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.9.2.	KN381	Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.10.	KN39	Pengelolaan Aset Barang Jaminan Diambil (BJDA)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.11.	KN310	Pengelolaan Aset Aset Milik Asing/Tiongkok	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.12.	KN311	Pengelolaan Barang Gratifikasi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.13.	KN312	Pengelolaan Barang Rampasan Kejaksaan	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.14.	KN313	Pengelolaan Barang Rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.15.	KN314	Pengelolaan Barang Tegahan Kepabeanan dan Cukai	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
4.16.	KN315	Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
5.	KN4	Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisah (KND)				
5.1.	KN40	Pengelolaan BHMN/PT				
5.1.1.	KN400	Pendirian / perubahan BHMN/PT	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.1.2.	KN401	Penetapan Kekayaan Awal BHMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.2.	KN41	Penyusunan Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak atas kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.3.	KN42	Penyertaan Modal Negara				
5.3.1.	KN420	Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.3.2.	KN421	Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BPYBDS.	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.3.3.	KN422	Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari fresh Money.	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.3.4.	KN423	Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Piutang Negara (SLA/RDI)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.3.5	KN424	Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.4.	KN43	Privatisasi BUMN				
5.4.1.	KN430	Penetapan PP Privatisasi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.4.2.	KN431	Pelaksanaan Pembahasan Persetujuan Privatisasi di DPR	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.4.3.	KN432	Pembahasan PTP di Komite Privatisasi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.4.4.	KN433	Penetapan PP Privatisasi baru	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.5.	KN44	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan Laporan Tahunan dan RKAP BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.6.	KN45	Penetapan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi BUMN	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.7.	KN46	Pengelolaan BMN eks Pertamina				

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.7.1.	KN460	Pemanfaatan BMN Aset Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.7.2.	KN461	Pemindahtangan BMN Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.7.3	KN462	Penghapusan BMN Aset Eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
5.7.4.	KN463	Penetapan BMN eks Entitas yang Mendapatkan Penyertaan Modal Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
6.	KN5	Penilaian				



Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.1.	KN50	Pelaporan Penilaian	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Penilaian/Kanwil/KPKNL
6.2.	KN51	Data dan Informasi Penilaian				
6.2.1	KN510	Dokumen Basis Data dan Informasi Penilaian	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Penilaian/Kanwil/KPKNL
6.2.2.	KN511	Laporan Rekapitulasi Kinerja di Bidang Penilaian	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penilaian/Kanwil/KPKNL
6.3.	KN52	Laporan Pendukung Penilaian				
6.3.1.	KN520	Laporan Analisis/Reviu Laporan Penilaian	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Penilaian/Kanwil/KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.3.2.	KN521	Penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB)	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Penilaian/Kanwil/KPKNL
7.	KN6	Piutang Negara				
7.1.	KN60	Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)				
7.1.1.	KN600	Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.1.2.	KN601	Pengurusan Piutang Instansi Pemerintah/BLU	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.2.	KN61	Kajian Piutang Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara
7.3.	KN62	Pengembalian Pengurusan Piutang BUMN/BUMD	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.4.	KN63	Penghapusan Piutang Negara	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.4.1.	KN630	Penghapusan Bersyarat Piutang Negara	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.4.2.	KN631	Penghapusan Mutlak Piutang Negara	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.5.	KN64	Pencegahan/Izin Debitor ke Luar Negeri				
7.5.1.	KN640	Pencabutan Debitor ke Luar Negeri	Rahasia	Eselon III	Berkaitan dengan privasi	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.5.2.	KN641	Pencegahan debitor ke LN	Rahasia	Eselon III	Berkaitan dengan privasi	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.5.3.	KN642	Izin Debitor	Rahasia	Eselon III	Berkaitan dengan privasi	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.6.	KN65	Laporan Piutang Negara	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.7.	KN66	Pembukuan Penerimaan Piutang Negara				

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.7.1.	KN660	Daftar Buku/Register	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.7.2.	KN661	Buku Kliring	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.7.3.	KN662	Debet/Kredit	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
7.8.	KN67	Penerbitan Surat Pengantar Roya	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.9.	KN68	Pencairan Barang Jaminan	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Piutang Negara/Kanwil/KPKNL
8.	KN7	Lelang				
8.1.	KN70	Risalah Lelang				
8.1.1.	KN700	Minuta risalah lelang barang tidak bergerak yang terjual	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
8.1.2.	KN701	Minuta risalah lelang barang tidak bergerak Tidak Ada Peminat (TAP) / Batal	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
8.1.3.	KN702	Minuta risalah lelang barang bergerak yang terjual	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
8.1.4.	KN703	Minuta risalah lelang barang bergerak berwujud Tidak Ada Peminat (TAP) /Ditahan /Batal	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
8.1.5.	KN704	Minuta risalah lelang barang bergerak tidak berwujud Tidak Ada Peminat (TAP) /Ditahan /Batal	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
8.1.6.	KN705	Salinan risalah lelang	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Kanwil/KPKNL
8.2.	KN71	Buku Register Lelang	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak atas kinerja kementerian Keuangan	Kanwil/KPKNL
8.3.	KN72	Pembukuan Lelang	Terbatas	Eselon III/IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL

Fungsi : Kekayaan Negara  
 Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
8.3.1.	KN720	Buku Kas	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
8.3.2.	KN721	Bukti Pelunasan untuk Pembelian Lelang yang Dikeluarkan Bendahara Penerima	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	KPKNL
8.3.3.	KN722	Tanda Terima	Terbatas	Eselon IV	Penyalahgunaan informasi	KPKNL
8.4.	KN73	Laporan Lelang				
8.4.1.	KN730	Laporan Pelaksanaan Lelang	Terbatas	Eselon IV	Penyalahgunaan Informasi	Direktorat Lelang/Kanwil/KPKNL
8.4.2.	KN731	Laporan Tahunan Pelaksanaan Lelang	Terbatas	Eselon IV	Penyalahgunaan Informasi	Direktorat Lelang/Kanwil/KPKNL
8.5.	KN74	Berkas Pejabat Lelang	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan privasi	Direktorat Lelang/Kanwil
8.6.	KN75	Berkas Balai Lelang	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan sengketa antara Negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga	Direktorat Lelang/Kanwil



Fungsi : Kekayaan Negara  
Kode : KN

Fungsi kekayaan negara adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
8.7.	KN76	Berkas Pendukung Kegiatan Lelang	Terbatas	Eselon IV	Penyalahgunaan Informasi	KPKNL

Fungsi : Kajian Dan Penelitian  
Kode : KT

Fungsi kajian dan penelitian adalah melakukan kajian dan penelitian ekonomi negara, dan kajian lainnya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	KT0	Kajian Kebijakan Fiskal				
1.1.	KT00	Kajian Kebijakan Pajak dan PNB	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian Kebijakan Pajak dan PNB
1.2.	KT01	Kajian Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian Kebijakan Kepabeanan dan Cukai
1.3.	KT02	Kajian Kebijakan Ekonomi Makro	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian Kebijakan Ekonomi Makro
1.4.	KT03	Kajian Kebijakan APBN	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian Kebijakan APBN
1.5.	KT04	Kajian Kebijakan Kerjasama Internasional	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian

Fungsi : Kajian Dan Penelitian  
 Kode : KT

Fungsi kajian dan penelitian adalah melakukan kajian dan penelitian ekonomi negara, dan kajian lainnya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						Kebijakan Kerjasama Internasional
1.6.	KT05	Kajian Kebijakan Sektor Keuangan	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian Kebijakan Sektor Keuangan
1.7.	KT06	Kajian Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kajian Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
1.8.	KT07	Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR
2.	KT1	Formulasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi : Kajian Dan Penelitian  
Kode : KT

Fungsi kajian dan penelitian adalah melakukan kajian dan penelitian ekonomi negara, dan kajian lainnya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.1.	KT10	Formulasi Kebijakan Pajak dan PNPB	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan Pajak dan PNPB
2.2.	KT11	Formulasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai
2.3.	KT12	Formulasi Kebijakan Ekonomi Makro	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan Ekonomi Makro
2.4.	KT13	Formulasi Kebijakan APBN	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan APBN
2.5.	KT14	Formulasi Kebijakan Kerja Sama Internasional	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan Kerja Sama Internasional

Fungsi : Kajian Dan Penelitian  
Kode : KT

Fungsi kajian dan penelitian adalah melakukan kajian dan penelitian ekonomi negara, dan kajian lainnya.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.6.	KT15	Formulasi Kebijakan Sektor Keuangan	Terbatas	Eselon II	Digunakan sebagai dasar pertimbangan dari pengambilan kebijakan	BKF/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait Formulasi Kebijakan Sektor Keuangan
3.	KT2	Kajian dan Penelitian Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Seluruh Unit Eselon I

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PBO	Pelaksanaan Anggaran				
1.2.	PB00	Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran				
1.2.1.	PB000	Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Non Pertahanan dan Keamanan Negara	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
1.2.2.	PB001	Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan dan Keamanan Negara	Rahasia	Eselon II	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
1.3.	PB01	Dispensasi Uang Persediaan	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
1.4.	PB02	Reviu Pelaksanaan Anggaran				
1.4.1.	PB020	Reviu Pelaksanaan Anggaran Non Pertahanan dan Keamanan Negara	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.4.2.	PB021	Reviu Pelaksanaan Anggaran Pertahanan dan Keamanan Negara	Rahasia	Eselon II	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
1.5.	PB03	Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
2.	PB1	Pengelolaan Kas Negara				
2.1.	PB10	Optimalisasi Kas	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2.2.	PB11	Kebijakan <i>Treasury Dealing Room</i> (TDR)	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2.3.	PB12	Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas				
2.3.1.	PB120	Penetapan Bank Persepsi dan kanal pembayaran, Bank Operasional, dan Bank Penyalur Gaji	Terbatas	Eselon IV	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2.3.2.	PB121	Pengelolaan Bank Persepsi dan kanal pembayaran, Bank	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		Operasional, dan Bank Penyalur Gaji				
2.3.3.	PB122	Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2.4.	PB13	Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2.5.	PB14	Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara
2.6.	PB15	Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas
3.	PB2	Sistem Manajemen Investasi				
3.1.	PB20	Hubungan Kelembagaan Investasi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan



Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.2.	PB21	Penganggaran, Pengelolaan Kinerja, dan Risiko Investasi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Penganggaran, Pengelolaan Kinerja, dan Risiko Investasi
3.3.	PB22	Investasi Badan Usaha Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Investasi Badan Usaha Milik Negara
3.4.	PB23	Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
3.5.	PB24	Kredit Program dan Investasi Lainnya	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya
3.6.	PB25	Tingkat Bunga Kredit	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Sistem Manajemen Investasi
4.	PB3	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum				
4.1.	PB30	Tarif, Remunerasi dan Informasi				
4.1.1.	PB300	Pengusulan Tarif Layanan BLU	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Tarif, Remunerasi Dan Informasi

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.1.2.	PB301	Penetapan Tarif Layanan BLU	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Subdit Tarif, Remunerasi Dan Informasi
4.1.3.	PB302	Remunerasi BLU	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Tarif, Remunerasi Dan Informasi
4.2.	PB31	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I/II/III
4.3.	PB32	Pembinaan Pengelolaan Kinerja BLU	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I/II/III
5.	PB4	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				
5.1.	PB40	Standar Akuntansi Pemerintah	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Subdit Standar Akuntansi Pemerintahan
5.2.	PB41	Sistem Akuntansi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Sistem Akuntansi

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.3.	PB42	Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara
5.4.	PB43	Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
5.4.1.	PB430	Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara ( <i>Unaudited</i> )	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
5.4.2.	PB431	Penyusunan Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara ( <i>Audited</i> )	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Subdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
5.5.	PB44	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.5.1.	PB440	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Pusat Sebelum dilakukan Pemeriksaan ( <i>Unaudited</i> )	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
5.5.2.	PB441	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Pusat Negara Setelah dilakukan Pemeriksaan ( <i>Audited</i> )	Terbuka	Umum/Publik	Tidak memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Subdit Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
5.6.	PB45	Statistik dan Analisis Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Subdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan
6.	PB5	Sistem Perbendaharaan Negara				
6.1.	PB50	Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Sistem Perbendaharaan Negara

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6.2.	PB51	Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon III	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Sistem Perbendaharaan Negara
7.	PB6	Pelayanan Perbendaharaan Negara				
7.1.	PB60	Pencairan Dana	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN
7.2.	PB61	Pelaporan Bank	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN
7.3.	PB62	Verifikasi Akuntansi	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN
7.4.	PB63	Manajemen Satuan Kerja	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN
7.5.	PB64	Pelayanan Perbendaharaan khusus Pinjaman dan Hibah				

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.5.1.	PB640	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
7.5.2.	PB641	Pelaporan Bank Khusus Pinjaman dan Hibah	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
7.5.3.	PB642	Verifikasi Akuntansi Khusus Pinjaman dan Hibah	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
7.6.	PB65	Pelayanan Perbendaharaan Khusus Penerimaan Negara				
7.6.1.	PB650	Pelaporan Penerimaan Negara	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Penerimaan
7.6.2.	PB651	Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Penerimaan
7.6.3.	PB652	Verifikasi, Akuntansi, dan Analisis Statistik	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Penerimaan

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.6.4.	PB653	Layanan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Penerimaan
7.7.	PB66	Pelayanan Perbendaharaan Khusus Investasi				
7.7.1.	PB660	Penyaluran Investasi	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Investasi
7.7.2.	PB661	Setelmen Investasi	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Investasi
7.7.3.	PB662	Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	KPPN Khusus Investasi
7.8.	PB67	Pembinaan Perbendaharaan				
7.8.1.	PB670	Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Kanwil Ditjen Perbendaharaan
7.8.2.	PB671	Supervisi KPPN	Terbatas	Eselon III	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.8.3.	PB672	Pelaporan Keuangan Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak terhadap kinerja Kementerian Keuangan	Kanwil Ditjen Perbendaharaan
8.	PB7	Pengelolaan Dana Kelapa Sawit				
8.1.	PB70	Penghimpunan Dana				
8.1.1.	PB700	Pungutan Ekspor	Terbatas	Eselon III	Terkait dengan privasi eksportir	Direktorat Penghimpunan Dana
8.1.2.	PB701	Pengembalian Pungutan Ekspor	Terbatas	Eselon III	Terkait dengan privasi eksportir	Direktorat Penghimpunan Dana
8.2.	PB71	Pengelolaan Dana				
8.2.1.	PB710	Pengelolaan Kerja Sama Pengelolaan Dana	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana
8.2.2.	PB711	Pengembangan dan Penempatan Dana	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana
8.3.	PB72	Perencanaan				
8.3.1.	PB720	Rencana Strategis Bisnis	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana



Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
8.3.2.	PB721	Rencana Bisnis Tahunan/Rencana Bisnis Anggaran	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana
8.3.3.	PB722	Rencana Penyaluran Dana	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana
8.4.	PB73	Penyaluran Dana				
8.4.1.	PB730	Penyaluran Selisih Dana Biodiesel	Terbatas	Eselon II	Terkait dengan kerahasiaan isi perjanjian kerja sama penyaluran dana	Direktorat Penyaluran Dana
8.4.2.	PB731	Penyaluran Dana Riset	Terbatas	Eselon II	Terkait dengan kerahasiaan isi perjanjian kerja sama penyaluran dana	Direktorat Penyaluran Dana
8.4.3.	PB732	Penyaluran Dana Pengembangan SDM	Terbatas	Eselon II	Terkait dengan kerahasiaan isi perjanjian kerja sama penyaluran dana	Direktorat Penyaluran Dana
8.4.4.	PB733	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana	Terbatas	Eselon II	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Penyaluran Dana

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
8.5.	PB74	Kemitraan				
8.5.1.	PB740	Penyusunan Rencana Kemitraan	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Kemitraan
8.5.2.	PB741	Identifikasi Kemitraan Pengembangan Kelapa Sawit	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Kemitraan
8.5.3.	PB742	Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Kelapa Sawit	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Kemitraan
8.5.4.	PB743	Pelaporan Realisasi Kemitraan	Terbatas	Umum/publik	Tidak memiliki dampak yang berpengaruh pada kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Kemitraan
9.	PB8	Pengelolaan Investasi Pemerintah				
9.1.	PB80	Setelmen Investasi	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Pengelolaan Investasi Pemerintah
9.2.	PB81	Kerjasama Pendanaan	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Pengelolaan Investasi Pemerintah
9.3.	PB82	Penghimpunan Dana				

Fungsi : Perbendaharaan  
Kode : PB

Fungsi perbendaharaan adalah arsip yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
9.3.1.	PB820	Proposal Investasi	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Pengelolaan Investasi Pemerintah
9.3.2.	PB821	Permohonan Pencairan	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Pengelolaan Investasi Pemerintah
9.4.	PB83	Pengelolaan Aset Piutang	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Pengelolaan Investasi Pemerintah
10.	PB9	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)				
10.1.	PB90	Pengelolaan Sistem Informasi Internal	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Subdit Pengelolaan Sistem Informasi Internal
10.2.	PB91	Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Subdit Pengelolaan Sistem Informasi Internal

Fungsi : Profesi Keuangan  
Kode : PK

Fungsi profesi keuangan adalah penyiapan perizinan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PK0	Perizinan Profesi Keuangan				
1.1.	PK00	Perizinan Akuntan				
1.1.1.	PK000	Pendaftaran Akuntan Beregister	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.1.2.	PK001	Perizinan Akuntan Berpraktik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.1.3.	PK002	Perizinan Akuntan Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.1.4.	PK003	Perizinan Kantor Jasa Akuntan (KJA)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.1.5.	PK004	Perizinan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.1.6.	PK005	Perizinan Usaha Kantor Akuntan Publik Asing	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.2.	PK01	Perizinan Penilai				

Fungsi : Profesi Keuangan  
Kode : PK

Fungsi profesi keuangan adalah penyiapan perizinan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.2.1.	PK010	Pendaftaran Penilai Beregister	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.2.2.	PK011	Perizinan Penilai Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.2.3.	PK012	Perizinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Kantor Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.3.	PK02	Perizinan Aktuaris				
1.3.1.	PK020	Pendaftaran Ajun Aktuaris Beregister	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.3.2.	PK021	Perizinan Aktuaris Beregister	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.3.3.	PK022	Perizinan Aktuaris Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
1.3.4.	PK023	Perizinan Kantor Konsultan Aktuaria,	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Fungsi : Profesi Keuangan  
Kode : PK

Fungsi profesi keuangan adalah penyiapan perizinan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan				
1.4.	PK03	Perizinan Profesi Keuangan Lainnya	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
2.	PK1	Pengawasan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan				
2.1.	PK10	Penyusunan Rencana Pemeriksaan Berkala Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
2.2.	PK11	Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
2.3.	PK12	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
2.4.	PK13	Sanksi Administratif Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Fungsi : Profesi Keuangan  
Kode : PK

Fungsi profesi keuangan adalah penyiapan perizinan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.	PK2	Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
4.	PK3	Komite Profesi Akuntan Publik				
4.1.	PK30	Administrasi Komite Profesi Akuntan Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
4.2.	PK31	Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
4.3.	PK32	Banding Komite Profesi Akuntan Publik	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PNO	Penerimaan Pajak				
1.1.	PN00	Administrasi Perpajakan				
1.1.1.	PN000	Pendaftaran/ Penguakuan/ Penghapusan/ Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak (WP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat yang menangani data WP
1.1.2.	PN001	Pengelolaan SPT/ Pembetulan SPT	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat yang menangani pengelolaan SPT



Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.1.3.	PN002	Pengelolaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat yang menangani pengelolaan pembayaran pajak
1.1.4.	PN003	Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat yang menangani data dan informasi perpajakan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.2.	PN01	Pemberian Izin/Fasilitas Perpajakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat yang menangani pemberian izin/fasilitas perpajakan
1.3.	PN02	Pemeriksaan dan Penagihan Pajak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat yang menangani pemeriksaan dan penagihan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.4.	PN03	Sengketa Perpajakan (Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat/unit pengolah yang menangani sengketa perpajakan
1.5.	PN04	Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Keuangan, Informasi berkaitan dengan data pribadi, Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari	Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat/unit pengolah yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
					persaingan usaha tidak sehat	
2.	PN1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
2.1.	PN10	Pengelolaan PNBP				
2.1.1.	PN100	Penyusunan Target dan Pagu PNBP	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat PNBP
2.1.2.	PN101	Penyusunan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat PNBP
2.1.3.	PN102	Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat PNBP
2.1.4.	PN103	Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat yang menangani optimalisasi penerimaan negara

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.2.	PN11	PNBP Minyak dan Gas (Migas)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat yang menangani PPh Migas
2.3.	PN12	PNBP Kegiatan Usaha Panas Bumi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat yang menangani PPh, PPn, PNBP dari kegiatan panas bumi
2.4.	PN13	PNBP Kegiatan Usaha Hilir Migas	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat yang menangani kegiatan usaha hilir migas
2.5.	PN14	PNBP Deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat PNBP
2.6.	PN15	Laporan PNBP Kementerian/Lembaga	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat PNBP
3.	PN2	Pabean				
3.1.	PN20	Perizinan/Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan				
3.1.1.	PN200	Tempat Penimbunan Berikat/Kawasan Berikat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.1.2.	PN201	Gudang Berikat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait gudang berikat
3.1.3.	PN202	Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait TPPB
3.1.4.	PN203	Toko Bebas Bea (TBB)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait TBB
3.1.5.	PN204	Registrasi Kepabeanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang memiliki tugas terkait registrasi kepabeanan
3.2.	PN21	Pengangkutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.3.	PN22	Impor Barang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.4.	PN23	Ekspor Barang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.5.	PN24	Penetapan Nilai Pabean	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.6.	PN25	Pembebasan/Keringanan Bea Masuk				
3.6.1.	PN250	Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Bidang Politik dan Hubungan Internasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Kepabeanan Internasional/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.6.2.	PN251	Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Bidang Ekonomi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Kepabeanan

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						Internasional/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.6.3.	PN252	Pembebasan/ Keringanan Bea Masuk bidang Sosial/Budaya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Kepabeanan Internasional/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.6.4.	PN253	Pembebasan/ Keringanan Bea Masuk Bidang Militer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Kepabeanan Internasional/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan



Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3.6.5.	PN254	Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Bidang Pertambangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Kepabeanan Internasional/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.7.	PN26	Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Tempat Penimbunan Berikat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Fasilitas Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.8.	PN27	Pengembalian Bea Masuk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.9.	PN28	Penagihan dan Penyitaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan/unit pengolah

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
3.10.	PN29	Kawasan Perdagangan Bebas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan/Direktorat Fasilitas Kepabeanan/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan kepabeanan
4.	PN3	Penerimaan Cukai				
4.1.	PN30	Pita Cukai				
4.1.1.	PN300	Pengadaan Pita Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.1.2.	PN301	Perusakan Pita Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.1.3.	PN302	Pengembalian Pita Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.1.4.	PN303	Pemindahlekatan Pita Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.2.	PN31	Pengusaha Barang Kena Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.3.	PN32	Penetapan Tarif Cukai dan Golongan Pabrik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
4.4.	PN33	Barang Kena Cukai				
4.4.1.	PN330	Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.4.2.	PN331	Mutasi Barang Kena Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.4.3.	PN332	Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.4.4.	PN333	Perusakan, Pencampuran, dan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.4.5.	PN334	Pencacahan dan Barang Kena Cukai Rusak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
4.5.	PN34	Fasilitas/Kemudahan Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
4.6.	PN35	Penagihan Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai/unit pengolah yang memiliki tugas pelayanan cukai
5.	PN4	Sengketa Penerimaan Negara				
5.1.	PN40	Perkara Pidana				
5.1.1.	PN400	Pengumpulan Informasi Perkara Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.1.2.	PN401	Penyampaian Informasi Perkara Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.1.3.	PN402	Penindakan Perkara Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.1.4.	PN403	Penyelesaian Perkara Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.2.	PN41	Perkara Nonpidana				
5.2.1.	PN410	Pengumpulan Informasi Perkara Nonpidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.2.2.	PN411	Penyampaian Informasi Perkara Nonpidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.2.3.	PN412	Penindakan Perkara Nonpidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5.2.4.	PN413	Pengelolaan Badan Hukum Pendidikan (BHP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.2.5.	PN414	Penyelesaian Perkara Nonpidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa kepabeanan dan cukai
5.3.	PN42	Perkara Penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP)				
5.3.1.	PN420	Pengumpulan Informasi Perkara NPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas sengketa terkait
5.3.2.	PN421	Penyampaian Informasi Perkara NPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
						pengolah yang memiliki tugas terkait
5.3.3.	PN422	Penindakan Perkara Perkara NPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait
5.3.4.	PN423	Pelimpahan Perkara NPP Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Narkotika Nasional (BNN)/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait
5.4.	PN43	Perkara Pelimpahan Kantor Bea dan Cukai Lainnya				
5.4.1.	PN430	Pengumpulan Informasi Perkara Pelimpahan dari Kantor Bea dan Cukai Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait
5.4.2.	PN431	Penyampaian Informasi Perkara Pelimpahan dari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit



Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		Kantor Bea dan Cukai Lainnya				pengolah yang memiliki tugas terkait
5.4.3.	PN432	Penindakan Perkara Pelimpahan dari Kantor Bea dan Cukai Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan/unit pengolah yang memiliki tugas terkait
6.	PN5	Pengawasan Penerimaan Negara				
6.1.	PN50	Audit Penerimaan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
6.2.	PN51	Intelijen Bea dan Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang memiliki tugas terkait intilejen
7.	PN6	Sarana dan Prasarana Operasi Penerimaan Negara				
7.1.	PN60	Patroli Laut				

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.1.1.	PN600	Tugas Patroli	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pangkalan Sarana Operasi
7.1.2.	PN601	Kapal Patroli	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Pangkalan Sarana Operasi
7.2.	PN61	Senjata Api	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi terkait senjata api
7.3.	PN62	Biaya Operasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Unit pengolah yang menangani fungsi terkait biaya operasi
8.	PN7	Administrasi Kegiatan Pendukung Penerimaan				
8.1.	PN70	Pengendalian Mutu Barang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

Fungsi : Penerimaan Negara  
Kode : PN

Fungsi penerimaan negara adalah melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penerimaan negara, pemeriksaan dan penagihan, penyelesaian sengketa penerimaan, dan pemberian bimbingan teknis serta fasilitas di Kementerian Keuangan.

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
8.2.	PN71	Pengukuran <i>Dwelling Time</i>	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Kedeputian Proses Bisnis LNSW
8.3.	PN72	Pembatasan Impor/Ekspor Barang	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Keuangan	Kedeputian Proses Bisnis LNSW

C. Pengamanan Arsip

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana	Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan sarana dan prasarana khusus.	<i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS"	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman.	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. File-file elektronik (termasuk	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital). 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat	1. Autentikasi server. 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i>

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana	Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana
		pada fisik arsip.	penegak hukum.		database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	individual.	khusus atau aplikasi khusus. 3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.
3.	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan	Lokasi aman dengan akses yang terbatas.	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.	1. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi	1. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i>

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana	Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana
		memberikan cap “RAHASIA” pada fisik arsip. 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia.	eksternal serta penegak hukum.		2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut. 2. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 3. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual.	khusus atau aplikasi khusus. 2. <i>Firewall</i> serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana	Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana
						komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita.	

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana	Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana
4.	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “SANGAT RAHASIA” pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal, serta penegak hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses.</li> <li>2. Penerapan kebijakan “Meja harus bersih”.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.</li> <li>2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>pass word</i> atau ID digital)</li> <li>2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autentikasi server.</li> <li>2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus.</li> </ol>



No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana	Arsip	Pengguna	Sarana dan Prasarana
						3. Firewall dan sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
  
ANWARI  
NIP 19621005-198209 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 196 /PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN  
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Standar Sarana dan Prasarana

I. Standar Gedung dan/atau Ruangan

1. Lokasi

- a. Lokasi gedung dan/atau ruangan penyimpanan arsip dapat berada di lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor.
- b. Lokasi gedung dan/atau ruangan penyimpanan arsip harus memenuhi kriteria seperti:
  - 1) hindari area yang dekat dengan penyimpanan bahan kimia, unit AC, kamar mandi atau *basement* yang bukan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan arsip;
  - 2) hindari daerah atau lokasi yang memiliki kandungan polusi udara tinggi, bekas hutan dan perkebunan, rawan kebakaran, rawan banjir, dan yang berdekatan dengan keramaian/pemukiman penduduk atau pabrik; dan
  - 3) jalan masuknya terkontrol dan terhindar dari unsur-unsur yang mengganggu keamanan arsip.

2. Konstruksi dan Bahan Baku

- a. Konstruksi bangunan dibuat untuk dapat bertahan dari cuaca dan tidak mudah terbakar serta menggunakan bahan-bahan bangunan yang tidak mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya;
- b. untuk bangunan bertingkat, masing-masing lantai ruang simpan arsip tingginya 260-280 cm, sedangkan untuk bangunan tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan dengan tinggi rak yang digunakan;
- c. konstruksi bangunan berupa rumah panggung dapat digunakan di daerah yang memiliki kelembaban udara tinggi dan banyak terdapat rayap dengan tiang penyangga rumah panggung didesain anti rayap;
- d. lantai bangunan didesain secara kuat dan tidak mudah terkelupas untuk dapat menahan beban berat arsip dan rak;
- e. pondasi bangunan didesain untuk menjaga uap atau udara lembab tidak naik ke tembok karena daya resapan kapiler;

- f. pondasi bangunan didesain secara kuat sehingga mampu menahan terpaan angin kencang dan hujan deras.

### 3. Tata Ruang

- a. Tata ruang gedung penyimpanan arsip pada dasarnya dapat dibagi 3 (tiga) yaitu: ruangan kerja, ruangan penyimpanan arsip inaktif dan ruangan lain sebagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan arsip;
- b. ruangan kerja merupakan ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan menerima arsip yang baru dipindahkan, membaca arsip inaktif, ruang fumigasi dan ruang mengolah arsip inaktif;
- c. ruang penyimpanan arsip inaktif digunakan khusus untuk menyimpan arsip sesuai dengan jenis media simpan dan dibuatkan denah lokasi penyimpanan arsip;
- d. apabila fasilitas proteksi arsip vital dan arsip terjaga berada di gedung penyimpanan arsip inaktif, maka ruang penyimpanan didesain khusus yang tahan api dan memiliki alat pengatur suhu serta kelembaban tersendiri;
- e. hindari pemasangan jendela pada ruangan penyimpanan arsip inaktif;
- f. ruang penyimpanan arsip dengan media simpan magnetik harus terlindungi dari medan magnet;
- g. tinggi rak konvensional disesuaikan dengan ketinggian atap ruang penyimpanan arsip inaktif dengan jarak antara atap ruangan dan rak arsip kurang lebih 60 cm;
- h. jarak rak dan tembok berkisar antara 70 cm - 80 cm; dan
- i. jarak baris rak yang satu dengan baris rak lainnya berkisar antara 100 cm - 110 cm.

### 4. Beban Muatan

- a. Beban muatan ruang penyimpanan arsip inaktif didasarkan pada berat rak dan arsip yang disimpan. Sebagai dasar perhitungannya:
  - 1) satuan volume arsip adalah meter linear (ML)
  - 2) 1 Meter Linear (ML) arsip rata-rata = 50 kg
  - 3) 1 M<sup>3</sup> arsip rata-rata = 600 kg
  - 4) 1 M<sup>3</sup> arsip = 12 Meter Linear (ML) arsip;

- b. berat beban arsip dan peralatan rak konvensional (rak statis) rata-rata 1.200 kg per meter persegi. Berat beban rak bergerak (*compactshelving/roll o'pact*) 2.400 kg per meter persegi;
- c. untuk ruang simpan arsip seluas 10 meter persegi penuh dengan rak konvensional dan arsip, maka berat bebannya mencapai  $1.200 \text{ kg} \times 10 = 12.000 \text{ kg}$ . Dengan demikian, konstruksi lantai bangunan harus mampu menahan beban minimal sebanyak 12.000 kg.

#### 5. Kapasitas Ruang Simpan

Rata-rata setiap 200M<sup>2</sup> ruang simpan arsip dengan ketinggian 260 cm dapat menyimpan 1.000 meter linear arsip dengan menggunakan rak konvensional sedangkan penyimpanan dengan rak bergerak dapat menyimpan 1.800 meter lari arsip.

#### 6. Suhu dan Kelembaban

Suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan arsip disesuaikan dengan jenis media simpan arsip yang dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa secara periodik suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan arsip sebagaimana tabel I dengan menggunakan alat higrometer dan termometer;
- b. menjaga kelancaran sirkulasi udara ruangan penyimpanan arsip; dan
- c. menjaga atap, dinding dan lantai tidak berlubang dan tetap rapat.

#### 7. Cahaya dan Penerangan

- a. Cahaya dan penerangan tidak menyilaukan, berbayang dan sangat kontras; dan
- b. sinar matahari tidak boleh langsung mengenai arsip. Jika cahaya masuk melalui jendela tidak dapat dihindari, maka dapat diberi tirai penghalang cahaya matahari.

#### 8. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Serangga

- a. Bangunan tempat penyimpanan arsip tidak dianjurkan untuk menggunakan kayu; dan

- b. lantai bangunan dianjurkan untuk disuntik dengan DDT atau *Gammexane* atau *Penthachlorophenol* hingga kedalaman 50 cm.

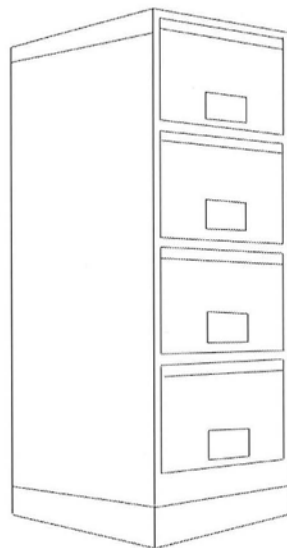
9. Pengamanan Gedung dan/atau Ruangan

- a. Pembatasan dan pengawasan akses ke ruang arsip dengan menggunakan akses kontrol dan CCTV; dan
- b. pencegahan bencana kebakaran dengan menyediakan alat pemadam seperti *heat/smoke detector*, *fire alarm*, *sprinkle system*, dan tabung APAR.

II. Standar Peralatan

1. *Filing Cabinet*

- a. *Filing cabinet* merupakan sarana untuk menyimpan arsip aktif yang sudah ditata.
- b. *Filing cabinet* yang digunakan merupakan *filing cabinet* yang memiliki empat laci.
- c. Setiap laci *filing cabinet* idealnya berisi 50 buah folder, dengan jumlah sekat 20-40 buah.
- d. *Filing cabinet* harus memiliki kunci pengaman. Contoh *filing cabinet* dapat dilihat pada gambar I.



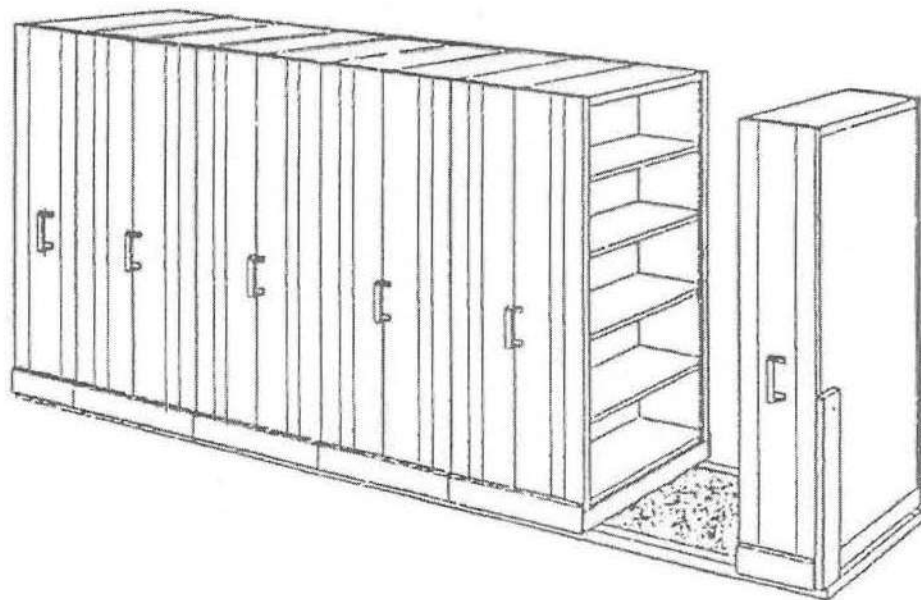
Gambar I. *Filing Cabinet*

2. Rak Arsip

- a. Rak arsip terbuat dari bahan metal yang tidak mudah berkarat;
- b. rak penyimpanan arsip inaktif dapat menggunakan rak konvensional seperti gambar II dan/atau rak bergerak seperti gambar III; dan
- c. tinggi rak konvensional dapat disesuaikan dengan ketinggian atap ruang penyimpanan arsip.



Gambar II. Rak Konvensional



Gambar III. Rak Bergerak

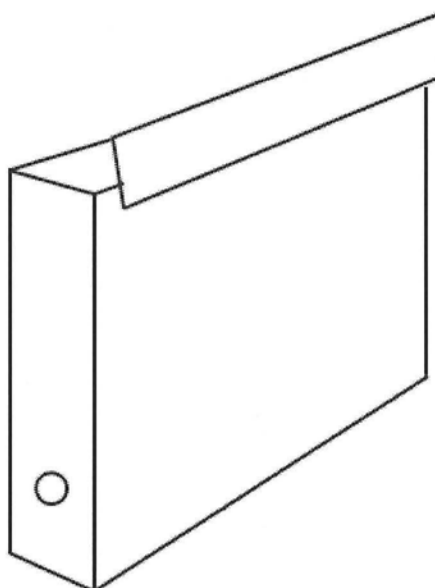
### 3. Boks Arsip

- a. Boks arsip dibuat dari bahan kardus, memiliki lubang sirkulasi udara, dan penutup untuk menjamin kebersihan.
- b. Bahan boks arsip terbuat dari karton gelombang, yaitu karton yang dibuat dari beberapa lapisan kertas medium bergelombang dengan kertas liner sebagai penyekat dan pelapisnya. Adapun standar bahan dasar boks arsip memenuhi ketentuan sebagai berikut:

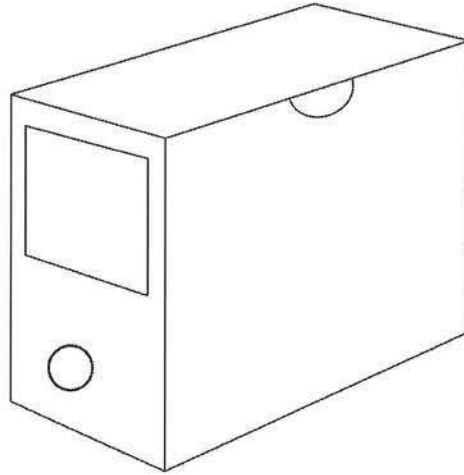
<b>Gramatur g/m<sup>2</sup></b>	<b>Tebal mm</b>	<b>Ketahanan Tekan Lingkar (Ring Crush) Kgf (N)</b>	<b>Ketahanan Tekan Datar (Uji Concora) kgf (N)</b>
112	0,18-0,20	11,2 (110)	11,2 (110)
125	0,20-0,23	12,5 (123)	12,54 (122)
150	0,24-0,27	15,0 (147)	14,7 (145)

Tabel II Standar Bahan Dasar Boks Arsip.

- c. Ukuran boks arsip yang digunakan terdiri atas:
  - 1) boks arsip kecil (37 X 9 X 27 cm)
  - 2) boks arsip sedang (37 X 19 X 27 cm)
- d. Rancang bangun dan bentuk boks arsip dapat dilihat pada gambar IV dan gambar V.



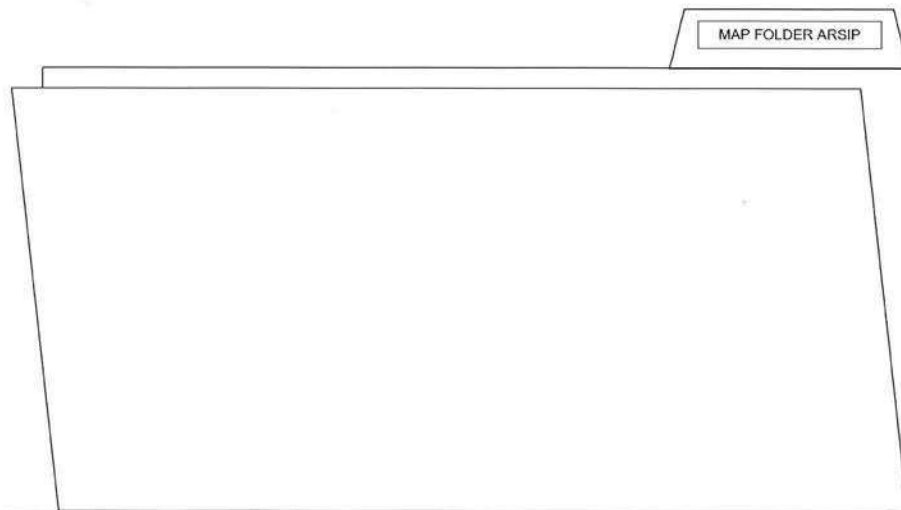
Gambar IV. Boks Arsip Berukuran Kecil



Gambar V. Boks Arsip Berukuran Besar

4. Folder Arsip

- a. Bahan folder Arsip terbuat dari lembar kertas manila karton.
- b. Bentuk folder seperti map dengan tab atau bagian menonjol disebelah kanan atas yang berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan kode/indeks.
- c. Ukuran folder yaitu: panjang 35,5 cm, lebar 24 cm ditambah 1 cm untuk lipatan. Panjang tab folder 8 cm, lebar tab folder 1,5 cm. Bentuk folder arsip dapat dilihat pada gambar VI.



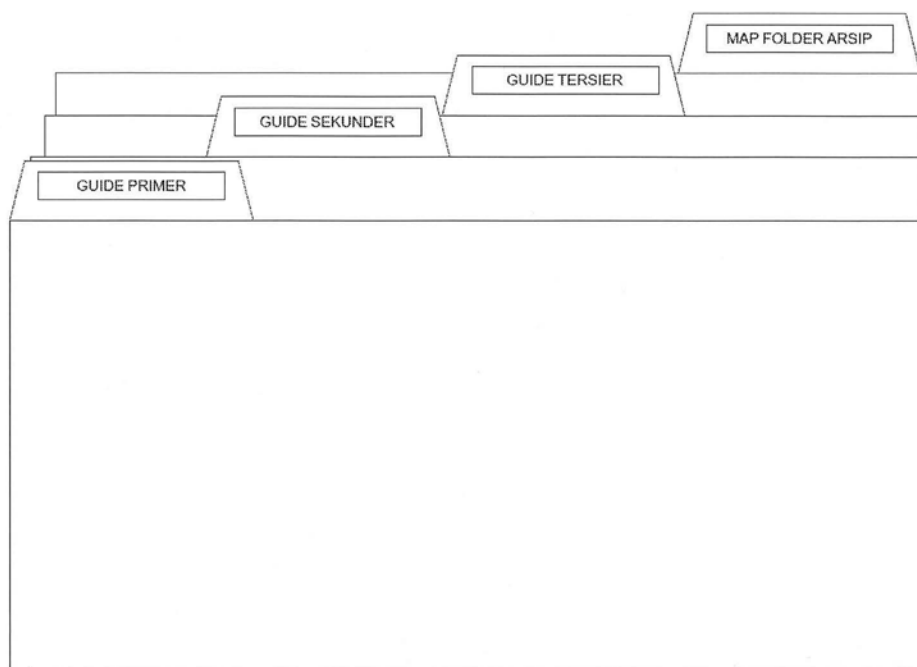
Gambar VI. Folder Arsip

5. *Guide* (sekat) Arsip

- a. *Guide* Arsip terbuat dari kertas karton  $\pm 1$  mm, lebih tebal dari bahan folder sehingga tidak mudah melengkung (terlipat).
- b. Bentuknya segi empat dan terdapat bagian yang menonjol yang juga disebut tab. Tab gunanya untuk menulis kode klasifikasi.



- c. Ukuran *guide* yaitu: panjang 35,5 cm, lebar 24 cm. Panjang tab *guide* 8 cm, lebar tab *guide* 1,5 cm.
- d. Klasifikasi menurut penggunaan *guide* adalah sebagai berikut:
  - 1) *Guide* Primer (dipergunakan untuk pokok masalah) ditandai dengan *guide* warna biru;
  - 2) *Guide* Sekunder (dipergunakan untuk sub masalah) ditandai dengan *guide* warna kuning; dan
  - 3) *Guide* Tersier (dipergunakan untuk sub-sub masalah) ditandai dengan *guide* warna hijau.



Gambar VII. *Guide* (sekat) Arsip

#### 6. *Out Indicator*

*Out indicator* merupakan alat yang digunakan untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau *filing cabinet*. *Out indicator* memiliki 2 jenis, yaitu:

##### a. *Out guide*

digunakan apabila arsip yang dipinjam meliputi keseluruhan berkas (satu folder).

##### b. *Out sheet*

digunakan apabila yang dipinjam hanya beberapa lembar atau item arsip saja. Bentuk *out indicator* dapat dilihat pada gambar VIII.

KELUAR					
No	Jenis Arsip	Jumlah	Peminjam	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali

Gambar VIII. *Out Guide* Arsip

KELUAR					
No	Jenis Arsip	Jumlah	Peminjam	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali

Gambar IX. *Out Sheet* Arsip

Tabel I. Standar Suhu Dan Kelembaban Ruangan Penyimpanan Arsip

Media Simpan	Kondisi Lingkungan			Pengamanan				Proteksi
	Suhu/Kelembaban (RH)	Kualitas Udara	Pencayaan	Alat Pemadam	Keamanan	Peralatan	Kontainer	Pembungkus
<b>Kertas (a)</b> 1. <i>Files</i> 2. <i>Cards</i> 3. <i>Computer Printout</i> dan sejenisnya	Suhu $\pm 27^{\circ}$ C Kelembaban $\pm 60\%$	Ventilasi balik ( <i>exhaust fan</i> )	Cukup Terang	1. <i>Heat/Smoke detection</i> 2. <i>Fire alarm</i> 3. <i>Sprinkel system</i> 4. <i>Extinguishers</i>	1. Area bebas gangguan manusia 2. <i>Access control</i>	Rak baja	Kuat dan Bersih	Arsip bersampul, berfolder atau beramplop
<b>Kertas (b)</b> 1. <i>Maps</i> 2. <i>Plans</i> 3. <i>Charts</i>	Suhu $\pm 27^{\circ}$ C Kelembaban $\pm 60\%$	Ventilasi balik ( <i>exhaust fan</i> )	Cukup Terang	1. <i>Heat/Smoke detection</i> 2. <i>Fire alarm</i> 3. <i>Sprinkel system</i> 4. <i>Extinguishers</i>	1. Area bebas gangguan manusia 2. <i>Access control</i>	Rak baja bentuk vertikal atau lingkaran	Kuat dan Bersih	Tidak diharuskan
<b>Media foto</b> 1. <i>Sheet film</i> 2. <i>Cine film</i> 3. <i>X-rays</i> 4. <i>Microforms</i>	Suhu $20^{\circ}$ C $\pm 2^{\circ}$ Kelembaban $\pm 50\%$ $\pm 5\%$	Ventilasi balik ( <i>exhaust fan</i> )	Cukup Terang	1. <i>Heat/Smoke detection</i> 2. <i>Fire alarm</i> 3. <i>Sprinkel system</i> 4. <i>Extinguishers</i>	1. Area bebas gangguan manusia 2. <i>Access control</i>	Rak baja	Kuat dan Bersih	Folder bersih

Media Simpan	Kondisi Lingkungan			Pengamanan				Proteksi
	Suhu/Kelembaban (RH)	Kualitas Udara	Pencahayaan	Alat Pemadam	Keamanan	Peralatan	Kontainer	Pembungkus
<b>Media Magnetik</b> 1. <i>Computer tapes dan discs</i> 2. <i>Video tapes</i> 3. <i>Audio tapes</i> 4. <i>Magneto optical disk</i>	Suhu 20° C ± 2° Kelembaban ±50% ± 5%	Ventilasi balik <i>(exhaust fan)</i>	Cukup Terang	1. <i>Heat/Smoke detection</i> 2. <i>Fire alarm</i> 3. <i>Sprinkel system</i> 4. <i>Extinguishers</i>	1. Area bebas gangguan manusia 2. <i>Access control</i>	Rak tidak mengandung magnetik	Tidak mengandung magnet, Rak karet bersegel	
<b>Media optik</b> 1. <i>Compact dan mini discs</i> 2. <i>Laser discs</i>	Suhu 20° C ± 2° Kelembaban ±50% ± 5%	Ventilasi balik <i>(exhaust fan)</i>	Cukup Terang	1. <i>Heat/Smoke detection</i> 2. <i>Fire alarm</i> 3. <i>Sprinkel system</i> 4. <i>Extinguishers</i>	1. Area bebas gangguan manusia 2. <i>Access control</i>	Rak baja	Boks kuat dan bersih	Sampul bersih

Media Simpan	Kondisi Lingkungan			Pengamanan				Proteksi
	Suhu/Kelembaban (RH)	Kualitas Udara	Pencayaan	Alat Pemadam	Keamanan	Peralatan	Kontainer	Pembungkus
<b>Media lainnya</b> 1. <i>Gramophone disks</i> 2. <i>Mixed media system</i>	Suhu ± 27° C Kelembaban ±60%	Ventilasi balik ( <i>exhaust fan</i> )	Cukup Terang	1. <i>Heat/Smoke detection</i> 2. <i>Fire alarm</i> 3. <i>Sprinkel system</i> 4. <i>Extinguishers</i>	1. Area bebas gangguan manusia 2. <i>Access control</i>	Rak baja	Boks kuat dan bersih	Pembungkus bersih

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANWARI  
NIP 19621005 198209 1 001

